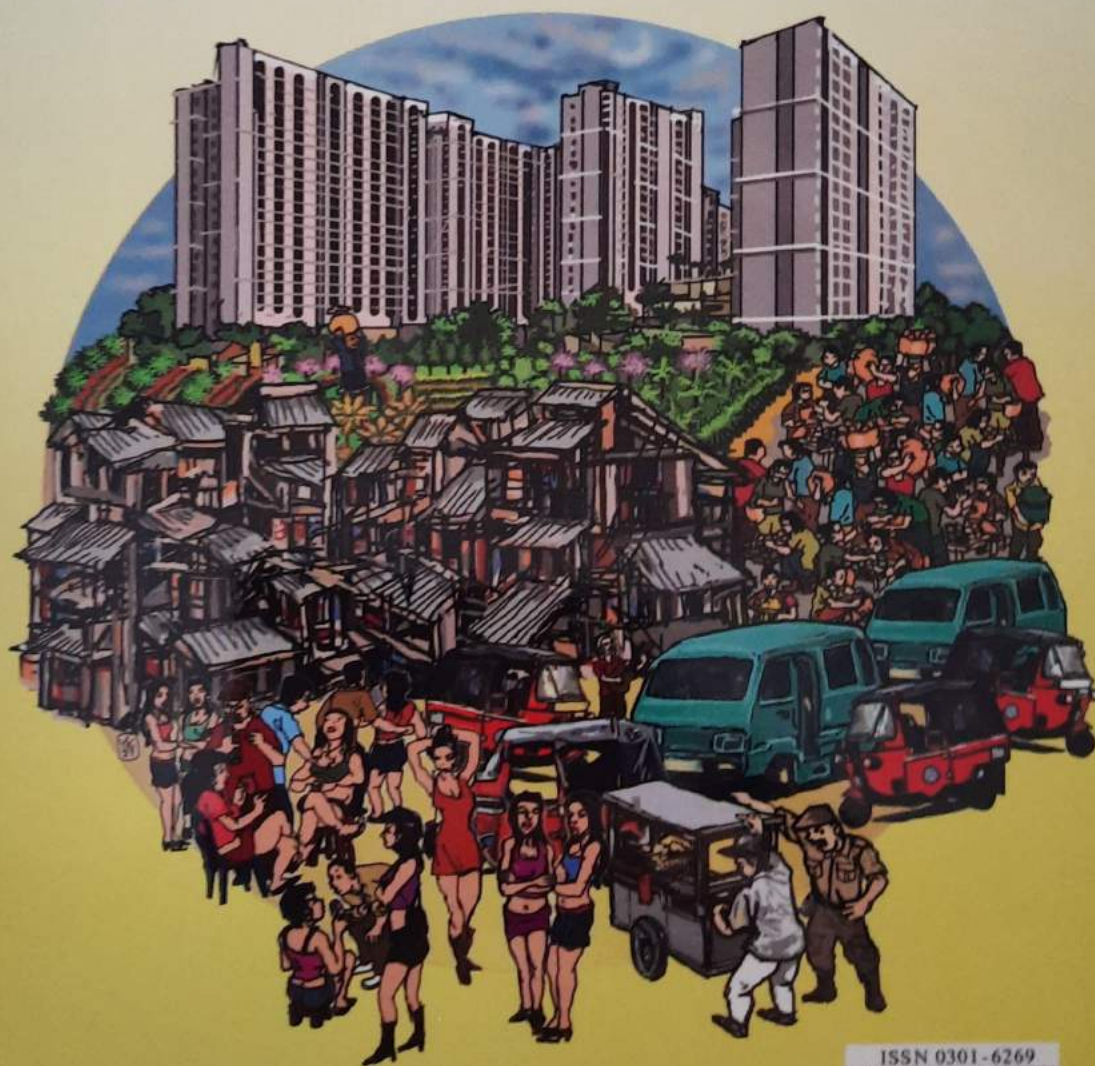


Prisma

Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Transformasi Ruang Kota: Mencari Keadilan Sosial-Ekologis



LP3ES



Volume 40, 2021

3

Laju Kapital dan Dinamika Kelas Ekonomi Informal Perkotaan

Muchtar Habibi

Transisi agraria di kawasan kapitalisme pinggiran seperti Indonesia tidak mengikuti jejak negeri di kawasan kapitalisme pusat. Di sini, banyak orang terlempar dari pertanian dan tak menemukan kerja upahan di perkotaan yang diatur negara. Sebagian menciptakan pekerjaan sendiri sementara yang lain terdampar dalam kerja upahan informal (tidak diatur negara). Pandangan umum melihat dualisme ekonomi sebagai penyebab melimpahnya pekerjaan informal di negeri pinggiran. Perspektif itu gagal melihat saling ketergantungan antara sektor formal dan informal dalam kapitalisme global. Meski ekonomi informal berkontribusi penting bagi laju ekonomi formal, tidak semua pelakunya punya sumbangan setara. Menyorot diferensiasi kelas di ekonomi informal menjadi prasyarat bagi tiap upaya membangun jembatan antara pekerja formal dan informal guna menentang kapitalis formal maupun informal demi merebut ruang hidup yang tersedia.

Kata Kunci: ekonomi informal, kapitalisme, pekerja, perkotaan, transisi agraria

Belakangan ini, perhatian terhadap miliaran orang di dunia yang terlihat dalam pekerjaan yang tak melindungi hak-hak dasar pekerja (berserikat, upah layak, jaminan sosial) kian mudah didengar.¹ Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebut sumber kerentanan mereka berakar pada watak pekerjaan informal; tempat negara absen melindungi pekerja. Pada 2010, ILO mengingatkan jumlah pekerja semacam itu berkisar antara 1,48-1,59 miliar orang², atau setara dengan separuh dari total angkatan pekerja dunia, yang sebagian be-

sar terletak di negeri pinggiran. Peringatan lembaga PBB itu berimpitan dengan gaung studi-studi yang menyorot berlimpahnya surplus populasi relatif³, suatu populasi yang tak terserap oleh derap akumulasi kapital global. Mereka menjadi pariah yang terombang-ambing antara desa-kota: terusir dari desa, tetapi tak begitu diinginkan oleh kota. Pandemi Covid-19 hanya memperparah krisis struktural pekerjaan di tingkat global, khususnya di negeri pinggiran, sekaligus meningkatkan situasi kedaruratan tentang bagaimana merawat berlimpahnya pekerja

¹ ILO, *Decent Jobs and Informal Economy, Report VI Submitted To The 90th Session Of International Labor Conference* (Geneva: ILO, 2002), hal. 4.

² ILO, *Global Employment Trends* (Geneva: ILO, 2010), hal. 18.

³ David Neilson dan Thomas Stubbs, "Relative Surplus Population and Uneven Development in the Neoliberal Era: Theory and Empirical Application", dalam *Capital & Class*, Vol. 35, No.3, 2011, hal. 435-453.

ekonomi informal di masa depan. Jawaban pertanyaan semacam itu memerlukan diskusi mendalam mengenai asal-usul ekonomi informal dan perannya dalam perkembangan kapitalisme, watak ekonomi informal dalam hubungannya dengan ekonomi formal, serta menelusuri dinamika internal para pelaku ekonomi informal untuk memahami masa depan reproduksi mereka.

Kapitalisme Global dan Ekonomi Informal

Sejak diperkenalkan kali pertama oleh antropolog Kevin Hart yang kemudian diadopsi ILO pada 1972, makna “ekonomi informal” tidaklah statis-sekali jadi, melainkan berubah seiring waktu. Dari tahun 1970-an hingga 1990-an, berpegang pada teori “ekonomi dualistik” (*dual-economy*) ala Arthur Lewis serta John Harris dan Michael Todaro⁴, ILO melihat ekonomi informal sebagai “sektor ekonomi” subsisten berwatak tradisional dengan teknologi sederhana dan kemudahan untuk bergabung—hanya butuh modal dan keterampilan minimal. “Sektor informal” berbanding terbalik dengan “sektor formal” modern yang ditandai dengan teknologi canggih dan tingkat kesulitan tinggi untuk bergabung, karena memerlukan banyak modal dan keterampilan tinggi. Kedua sektor dianggap tidak punya hubungan erat. Sumbangan sektor informal terhadap sektor formal amat sangat marginal. Menariknya, pada periode ini, ILO masih melihat perlunya mendukung kegiatan sektor informal. Dengan gagalnya pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan me-

nyerap pekerja ke sektor formal⁵ di kawasan pinggiran, ILO merasa sektor informal dapat menjadi alternatif bagi penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Yang perlu dilakukan hanyalah memperkuat sisi penawaran dan permintaan barang dan jasa dari dan bagi sektor informal.

Ketika istilah “ekonomi informal” mulai populer dan memperoleh perhatian luas pada tahun 1970-an dan 1980-an, perspektif lain turut mewarnai pemaknaan terhadap ekonomi informal. Meski mengamini hadirnya “ekonomi dualistik” ala ILO, ekonom neo-klasik yang diwakili Hernando de Soto⁶ kurang percaya dengan narasi ILO bahwa ekonomi informal adalah ekonomi sisa yang tidak produktif, dipenuhi oleh orang yang terpaksa bertahan hidup. Dengan menonjolkan kekuatan individu dan pasar, de Soto yakin jika ekonomi informal merupakan pilihan banyak orang ketika pemerintah dengan regulasi berlebihan gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Bagi de Soto dan koleganya, yang kemudian dikenal dengan kelompok *legalis*, ekonomi informal dapat diformalisasi asalkan pemerintah mengurangi campur tangan dan membiarkan usaha-sendiri para “pengusaha mikro” dalam ekonomi informal dapat berkembang. Akan tetapi, jika formalisasi ekonomi informal kurang memungkinkan, ekonom neoliberal Bank Dunia malah mengatakan pelaku sektor informal di negeri pinggiran sejatinya mirip pengusaha sukarela yang ada di negara maju, bukan pekerjaan sisa akibat kekurang-

⁴ Arthur W Lewis, “Economic Development with Unlimited Suppliers of Labour”, dalam *Manchester School of Economic and Social*, Vol. 22, No. 2, 1954, hal. 139-191; John R Harris dan Michael P Todaro, “Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis”, dalam *American Economic Review*, Vol. 60, No.1, 1970, hal. 126-142.

⁵ Menurut ILO, kegagalan ini berkaitan dengan dua hal: pertumbuhan penduduk yang tinggi pasca-Perang Dunia II dan minimnya pekerjaan baru yang diciptakan oleh industrialisasi di kawasan pinggiran. Problem yang disebut belakangan berakar pada watak industri yang dikembangkan terlalu padat modal. Produk yang dibuat adalah barang konsumsi modern untuk melayani “kelas atas.” Sementara itu, di sisi lain, uang negara yang diperoleh dari ekspor lebih banyak dihabiskan untuk membiayai industri berat (fondasi bagi industrialisasi) ketimbang mengatasi secara langsung masalah ketenagakerjaan.

⁶ Lihat, Hernando de Soto, *The Other Path* (New York: Harper & Row, 1989).

an pekerjaan layak.⁷ Jadi, tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan!

Pandangan ekonomi dualistik yang semula diterima begitu saja, mendapat sanggahan menohok dari kalangan strukturalis pada tahun 1980-an. Alejandro Portes dan Manuel Castells, misalnya, menunjukkan adanya kaitan erat antara ekonomi informal dan ekonomi formal.⁸ Pekerjaan sub-kontrak dari perusahaan ke komunitas atau rumah tangga (untuk produksi rokok, misalnya) yang menjamur sejak tahun 1980-an memperlihatkan bahwa ekonomi informal (baik pekerja upahan maupun usaha-sendiri) berada dalam posisi subordinat dan bergantung pada ekonomi formal. Dari sini terlihat bahwa ekonomi informal bukan sekadar aktivitas subsistensi yang minim kaitan dengan ekonomi formal, tetapi justru menyumbang ekonomi formal dengan menyediakan upah lebih murah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar formal dapat berkompetisi di tingkat global. Reorganisasi kapital dalam bentuk gelombang informalisasi aktivitas ekonomi formal (perusahaan-perusahaan besar) dalam arus neoliberal berbarengan dengan dipangkasnya hak-hak pekerja dan kian tipisnya bantuan sosial. Hal itu memaksa banyak orang menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri dalam ekonomi informal. Di sini, Portes dan Castells ingin mengatakan bahwa ekonomi informal dan ekonomi formal punya hubungan saling ketergantungan dan hidup dalam satu mode produksi yang sama: kapitalisme. Kemungkinan untuk memformalisasi ekonomi informal dalam kapitalisme tampak seperti ilusi belaka.

Portes dan Castells juga menyoal anggapan seolah-olah ekonomi informal berisi

komunitas ekonomi yang homogen. Mereka menentang ILO yang terkesan melihat orang-orang yang terlibat ekonomi informal sebagai pariah. Sebaliknya, mereka juga menyanggah terlalu optimistisnya kaum neoklasik dan Bank Dunia yang sering menganggap semua orang yang bergelut di ekonomi informal adalah “pengusaha mikro” yang terlibat dalam usaha-sendiri secara sukarela. Portes dan Castells menunjukkan bahwa terdapat diferensiasi di antara pelaku ekonomi informal: mereka yang subsisten, tersubordinasi, dan mereka yang relatif otonom. Kendati belum menggunakan analisis kelas secara ketat, kedua penulis itu setidaknya telah menyorot diferensiasi sosial dalam ekonomi informal.

Argumen dan dukungan riset empiris dari kalangan yang terkadang disebut “Neo-Marxis” itu, memaksa ILO mengubah *sebagian* haluannya dalam memahami ekonomi informal.⁹ Dalam dokumen kunci tahun 2002, ILO secara resmi menggeser istilah “sektor informal” menjadi “ekonomi informal”.¹⁰ Hal itu seolah mengisyaratkan bahwa “dualisme sektoral” sudah ditinggalkan oleh ILO. Mereka memperkenalkan istilah “pekerjaan informal” yang mencakup pekerja di sektor formal dan informal. Mereka adalah “pekerja yang tidak menjadi subjek aturan ketenagakerjaan, jaminan sosial, atau pajak pendapatan”.¹¹ Definisi luas seperti itu mencakup berbagai bentuk pekerjaan, dari mulai “usaha-sendiri”, majikan, pekerja keluarga (tak dibayar), pekerja upahan, dan anggota koperasi, baik dalam kegiatan usaha informal maupun sebagian usaha formal (lihat, Tabel 1). Kolom bernomor 1-6 dan 8-10

⁷ William F Maloney, “Informality Revisited”, dalam *World Development*, Vol. 32, No. 7, 2004, hal. 1159.

⁸ Alejandro Portes dan Manuel Castells, “World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of the Informal Economy”, dalam Alejandro Portes, Manuel Castells, dan Lauren A Benton (eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1989).

⁹ Aaron Benanav, “The Origins of Informality: The ILO at the Limit of the Concept of Unemployment”, dalam *Journal of Global History* Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 124.

¹⁰ ILO, *Decent Work and the Informal Economy...*, hal. 4.

¹¹ Ralf Hussmanns, “Statistical Definition of Informal Employment: Guidelines Endorsed by the Seventeenth International Conference of Labor Statisticians (2003)”, *Makalah* dipresentasikan pada 7th Meeting of the Expert Group on Informal Sector Statistics (Delhi Group), New Delhi, 2-4 Februari 2004, hal. 2.

Tabel. 1 Cakupan Pekerjaan Informal ILO¹²

Tipe Unit Produksi	Status Pekerjaan								
	Usaha-sendiri		Majikan		Pekerja keluarga		Pekerja (upahan)		Anggota koperasi produksi
	INF	F	INF	F	INF	INF	F	INF	F
Usaha sektor formal					1	2			
Usaha sektor informal#	3		4		5	6	7	8	
Rumah tangga untuk konsumsi sendiri	9					10			

Keterangan: INF= Informal, F= Formal

Usaha yang tidak terdaftar pada undang-undang nasional tertentu (bisnis, pajak, jaminan sosial, ketenagakerjaan dan seterusnya)

Kolom nomor 1: Pekerja keluarga (tidak dibayar) di sektor formal

Kolom nomor 2: Pekerja (upahan) di sektor formal

Kolom nomor 3: Usaha-sendiri di sektor informal

Kolom nomor 4: Majikan di sektor informal

Kolom nomor 5: Pekerja keluarga (tidak dibayar) di sektor informal

Kolom nomor 6: Pekerja (upahan) di sektor informal

Kolom nomor 7: Pekerja (upahan) formal di sektor informal

Kolom nomor 8: Anggota koperasi produksi di sektor informal

Kolom nomor 9: Usaha-sendiri untuk konsumsi rumah tangga

Kolom nomor 10: Pekerja (upahan) pada kegiatan usaha rumah tangga untuk konsumsi sendiri

merupakan cakupan **pekerjaan informal**, baik yang terdapat di sektor formal maupun sektor informal (jangan dicampur dengan istilah “pekerjaan di sektor informal”, yang dalam Tabel 1 hanya mencakup kolom bernomor 3-8). Kolom bernomor 4 menandakan bahwa ILO juga mulai mengakui adanya diferensiasi sosial dalam ekonomi informal. Kategori itu sering disebut sebagai “pengusaha mikro” oleh Bank Dunia atau “kapitalis kecil” menurut kaum Marxis.

Cakupan pekerjaan informal itu tidak berbeda dengan yang ditekankan Alejandro Portes dan William Haller¹³, bahwa pekerjaan informal sebagai aktivitas untuk memperoleh pendapatan yang tidak diatur oleh negara atau tidak menjadi objek pengaturan norma kelembagaan yang telah mapan. Dari konvergensi itu, terdapat konsensus luas bahwa pekerjaan informal dapat dipahami

¹³ Alejandro Portes dan William Haller, “The Informal Economy”, dalam Neil Smelser dan Richard Swedberg (eds.), *Handbook of Economic Sociology* (New York: Russell Sage Foundation, 2005), hal.404.

¹² Hussmanns, “Statistical Definition...”, hal. 16.

sebagai aktivitas penciptaan pendapatan yang tidak diatur negara dan karenanya tidak memiliki kontrak kerja, perlindungan terhadap pekerja, dan jaminan sosial. Pengertian itu menekankan bahwa pekerja dan sebagian besar pekerjaan informal (kecuali kapitalis kecil informal yang mempekerjakan buruh upahan) adalah pekerjaan yang tidak layak dan karenanya perlu diberantas.¹⁴ Pandangan itu menentang ekonom neoliberal dan Bank Dunia yang terlalu menggeneralisasi ekonomi informal dipenuhi oleh “pengusaha mikro” yang akan berhasil jika pasar dibiarkan mengurus mereka.

Bahkan, ketika istilah “pekerja informal” sangat berguna mempersoalkan hak-hak pekerja yang diabaikan dengan mengkritik pandangan optimistis berlebihan ala neoliberal, Bhalla menilai istilah ekonomi informal menghilangkan gambar mengenai “proses transisi dari sektor perdesaan tradisional, utamanya aktivitas pertanian, menuju aktivitas modern sebagian besar di perkotaan dan manufaktur”.¹⁵ Menurut Bhalla, itu karena ILO tidak pernah mensponsori riset ekonomi informal di perdesaan, sebesar perhatian mereka terhadap ekonomi informal perkotaan. Baginya, daripada istilah “pekerja informal”, konsep Marx tentang “surplus populasi relatif” dapat menjelaskan lebih baik proses orang terusir dari pertanian dan perdesaan yang akhirnya pindah mencari pekerjaan ke perkotaan, hanya untuk menemukan pekerjaan sebagai proletariat aktif (di sektor inti kapital) tidak tersedia dan terpaksa menjadi “pasukan cadangan pekerja.” Meski begitu, pada tahun 1990-an, ILO sebenarnya pernah melakukan penelitian soal ekonomi informal perdesaan.¹⁶ ILO bukannya tak punya

visi sama sekali terkait hubungan pertanian-perdesaan dengan industri-perkotaan. Dalam *tagline* “*basic needs*” awal tahun 1970-an, ILO secara keras meminta redistribusi kapasitas industri ke kawasan pinggiran di bawah kontrol negara, bukan melalui kontrol korporasi multi-nasional, sekaligus meminta diperlukannya redistribusi kepemilikan lahan pertanian melalui *land reform* yang dilihat sebagai keharusan bagi redistribusi kekuatan politik.¹⁷ Intervensi di perdesaan dan perkotaan dilihat ILO sebagai prasyarat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di kawasan pinggiran yang sebagian besar hidup dalam ekonomi informal.

Yang perlu dikritik adalah pendekatan ekonomi dualistik ILO dalam melihat persoalan ekonomi informal. Walaupun sebagian telah berubah, ILO pasca-2002 tetap bersandar pada asumsi ekonomi dualistik ketika merumuskan jalan keluar soal ekonomi informal. Mereka masih percaya formalisasi ekonomi informal dapat dilakukan sepanjang terdapat perbaikan kapasitas *governance* di kawasan pinggiran dan peningkatan efektivitas “dialog sosial”.¹⁸ Dengan kata lain, kritik utama terhadap ILO soal ekonomi informal adalah: mereka masih percaya ekonomi informal dapat diformalisasi dalam koridor sistem ekonomi kapitalisme. ILO gagal melihat saling ketergantungan antara ekonomi formal-informal dalam kapitalisme.

Bahkan, jika kritik Bhalla terhadap ekonomi informal yang diadopsi ILO dianggap tepat, mungkin akan terlalu simplistik membuang istilah “ekonomi informal” atau “pekerja informal” dan menggantinya dengan “surplus populasi relatif.” Di kalangan Marxis sendiri terdapat perdebatan pelik terkait ekonomi informal dan pekerja informal, termasuk berkelindannya dengan “surplus populasi relatif.” *Pertama*, Marx selalu menekankan bahwa tipologi yang dibuat dalam analisisnya tentang perkembangan kapitalisme di Inggris,

¹⁴ ILO, *Decent Jobs and the Informal Economy* ..., hal. 5.

¹⁵ Sheila Bhalla, “From ‘Relative Surplus Population’ and ‘Dual Labour Markets’ to ‘Informal’ and ‘Formal’ Employment and Enterprises: Insights About Causation and Consequences”, dalam *Agrarian South: Journal of Political Economy* Vol. 6, No. 3, 2017, hal. 303. 1. 5.

¹⁶ Lihat, ILO, *Development of the Rural Informal Sector: Policies and Strategies* (Geneva: ILO, 1993).

¹⁷ Benanav, “The Origins of Informality...”, hal. 120.

¹⁸ ILO, *Decent Jobs and the Informal Economy*..., hal. 5.

termasuk tipologinya soal “surplus populasi relatif” berakar pada konteks spesifik Inggris. Tipologi maupun konsep bisa berubah seiring perubahan konteks.¹⁹ Sebagaimana ditekankan Marx dalam *Grundrisse*, analisis konkret mencakup konsentrasi dari banyak faktor.²⁰ Analisis tentang fragmentasi proletariat antara mereka yang berperan sebagai “pekerja aktif” dan “pekerja cadangan” dalam kapitalisme perlu memperhatikan kerumitan konkret dari situasi tertentu.

Dari sini kita beranjak ke poin *kedua* bahwa berbagai riset empiris yang merekam kompleksitas pekerja informal konsisten dengan gagasan Marx mengenai “surplus populasi relatif.” Tamar Wilson, misalnya, berargumen bahwa berkat absennya negara, pekerja informal menjadi penyumbang “nilai lebih” lebih tinggi karena kapitalis tidak membayar sebagian besar biaya reproduksi bagi pekerja—hanya membayar biaya untuk kebutuhan fisik dasar buruh tanpa jaminan sosial.²¹ Dalam hal ini, informalitas dapat dilihat sebagai bagian dari *labour regime* yang digunakan sebagai mekanisme untuk memeras lebih banyak “nilai lebih” dari pekerja.²² Karena itu, bagi Wilson, pekerja informal adalah pekerja “pinggiran” yang dalam bahasa Marx disebut sebagai “pasukan cadangan pekerja”.²³ Sementara itu, pekerja formal dilihat sebagai bagian dari pekerja

“inti” mengingat kapitalis mesti membayar sebagian besar biaya reproduksi mereka berkat aturan negara yang mengatur hubungan kapitalis-pekerja. Konsistensi pekerja informal sebagai bagian dari “surplus populasi relatif” atau “pasukan cadangan pekerja” juga diisyaratkan oleh Neilson dan Stubbs saat mereka berusaha menerjemahkan kedua konsep abstrak Marx itu ke dalam ukuran lebih konkret. Hal serupa juga penulis dan Juliawan telah lakukan untuk analisis konkret di Indonesia.²⁴

Bagaimanapun juga, yang perlu ditekankan adalah membedakan antara “pekerja informal” dan “pekerjaan informal.” Hanya “pekerja informal” yang dapat dianggap sebagai bagian dari “surplus populasi relatif” (SPR). Sementara itu, “pekerjaan informal” seperti telah disinggung, mencakup pekerja upahan, usaha-sendiri (yang tidak mempekerjakan buruh upahan) dan majikan yang mempekerjakan buruh upahan. Pekerja upahan di ekonomi informal itulah yang ditekankan Mike Davis dengan istilah “*informal working class*”-nya, yang dari sudut pandang Wilson merupakan bagian dari SPR. Kategori terakhir tidak bisa disebut sebagai bagian dari SPR karena mereka adalah kapitalis kecil yang mengisap buruh upahan informal,²⁵ sekaligus menggarisbawahi diferensiasi yang disinggung Portes dan Castells sebelumnya. Yang masih menjadi perdebatan adalah posisi “usaha-sendiri” yang tidak mempekerjakan buruh upahan. Sebagian kalangan, seperti Kalyan Sanyal dan Rajesh Bhattacharyya²⁶,

¹⁹ Thomas Barnes, “Marxism and Informal Labour”, dalam *Journal of Australian Political Economy*, No. 70, No. 70, 2012, hal. 146.

²⁰ Henry Bernstein, *Class Dynamics of Agrarian Change* (Halifax NS: Fernwood Publishing, 2010), hal. 10.

²¹ Tamar D Wilson, “Precarization, Informalization and Marx”, dalam *Review of Radical Political Economics*, Vol. 52, No. 3, 2020, hal. 478.

²² Jonathan Pattenden, “Working at the Margins of Global Production Networks: Local Labour Control Regimes and Rural-Based Labourers in South India”, dalam *Third World Quarterly*, Vol. 37, No.10, 2016, hal.1809-1833.

²³ Untuk menghindari pembacaan fungsionalis seolah-olah “pekerja cadangan” sengaja diciptakan oleh kapital, kita perlu menekankan bahwa tidak semua yang terjadi dalam kapitalisme merupakan hasil upaya sengaja kapital. Ada faktor perjuangan kelas yang perlu dimasukkan dalam laju kapitalisme. Karena itu, banyak hal

bersifat “dampak tidak disengaja”, seperti dalam kasus melimpahnya “pekerja cadangan” di kawasan kapitalisme pinggiran, yang lahir dari dinamika kelas dan perkembangan kapitalisme global kontemporer.

²⁴ Muchtar Habibi dan Benny Hari Juliawan, “Creating Surplus Labour: Neoliberal Transformation and the Development of Surplus Population”, dalam *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 48, No. 4, 2018, hal. 649-670.

²⁵ Neilson dan Stubbs, “Relative Surplus Population and Uneven...”, hal. 442.

²⁶ Kalyan Sanyal dan Rajesh Bhattacharyya, “Beyond the Factory: Globalisation, Informalisation of Production and the New Locations of Labour”, dalam *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 22, 2009, hal. 35-44.

melihat Produsen Kecil Komoditas (PKK) yang tidak terlibat dalam aktivitas menerima maupun memberi upah, berada di luar relasi akumulasi kapital-pekerja (baik pekerja aktif maupun cadangan) dan berada diluar diskusi soal SPR. Namun, sebagaimana diingatkan Bernstein, PKK bukan entitas yang stabil. Dalam banyak kasus, PKK terlihat pada pedagang kaki lima (PKL) yang tidak terlalu laku dagangannya akan berusaha menambah penghasilan dari kerja upahan serabutan di tempat lain. Ketika rumah tangga PKK sudah mengombinasikan pekerjaannya berjualan komoditas kecil-kecilan dengan kerja buruh upahan untuk mereproduksi dirinya, mereka sudah menjadi bagian luas dari “kelas-kelas pekerja”.²⁷ Karena itu, mereka dapat dimasukkan dalam bahasan “pekerja aktif” versus “pekerja cadangan.”

Berkelindannya pekerja informal dan SPR memperlihatkan bahwa bertentangan dengan gagasan ekonomi dualistik yang diamini ILO dan Bank Dunia, ekonomi informal merupakan bagian tak terpisahkan dan berkait erat-saling ketergantungan dengan ekonomi formal dalam koridor corak produksi kapitalisme. Kaitan erat itu lahir berkat reorganisasi kapital pada tahun 1980-an yang berupaya meningkatkan laba dengan memangkas upah buruh melalui berbagai cara, antara lain, fleksibilisasi pasar kerja di kawasan pusat dan informalisasi pekerjaan di kawasan pinggiran kapitalisme global sebagaimana disinggung Portes dan Castells. Namun, yang kurang dari analisis mereka, perjuangan kelas oleh kapital dalam wujud neoliberal itu juga menandai pergeseran model pembangunan domestik di negeri kawasan pinggiran dari “pembagian kerja na-

sional” di bawah komando negara menjadi “pembagian kerja internasional” di bawah perintah korporasi multinasional.²⁸ Cristobal Kay mengargumentasikan proses itu membuat tidak tersambunganya perkembangan pertanian dan industri domestik di suatu negeri pinggiran.²⁹ Ketika banyak orang terlempar dari pertanian (proletarisasi) dan telanjur ke perkotaan, tetapi tak berhasil mendapat pekerjaan formal karena industrialisasi hanya sedikit berkembang, mereka dipaksa menciptakan pekerjaan sendiri atau mencari kerja upahan dalam ekonomi informal. Akhirnya, mereka mesti menjadi bagian dari “pekerja cadangan” yang ternyata dapat mendisiplinkan “pekerja aktif” (formal) dan menguntungkan posisi tawar kapital.

Perubahan Agraria dan Urbanisasi tanpa Industrialisasi

Pembahasan mengenai perubahan agraria dan urbanisasi tanpa disertai industrialisasi di Indonesia telah saya argumentasikan panjang lebar pada kesempatan lain.³⁰ Di sini, saya hanya akan membahas garis besar argumen itu. *Pertama*, proletarisasi di perdesaan berlangsung kian masif sejak tahun 1970-an, ketika komodifikasi pertanian mengalami ekspansi drastis di bawah panji Revolusi Hijau. Orang-orang terlempar dari pertanian dalam proses diferensiasi kelas yang di mediasi pasar. Petani dengan luas lahan besar mendapat bantuan lebih besar dari negara,

²⁷ Istilah “kelas-kelas pekerja” (*classes of labour*) digulirkan Henry Benrstein untuk menekankan watak “plural” atas terfragmentasinya kelas pekerja dalam berbagai *labour regime* atau corak eksploitasi yang berbeda; lihat, Henry Bernstein, “Capital and Labour from Centre to Margins”, *Makalah* disampaikan pada Konferensi “Living on the Margins”, Stellenbosch University, 26-28 Maret 2007.

²⁸ Farshad Araghi, “Global Depeasantization, 1945-1990”, dalam *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No. 2, 1995, hal. 345.

²⁹ Cristobal Kay, “Development Strategies and Rural Development: Exploring Synergies, Eradicating Poverty”, dalam *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No.1, 2009, hal. 103-137.

³⁰ Lihat, Muhtar Habibi, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980 an* (Tangerang: Marjin Kiri, 2016); juga, Habibi dan Juliawan, “Creating Surplus Labour...”, hal. 649-670.

sementara petani gurem hanya memperoleh manfaat minimal. Petani dengan luas lahan besar bisa terus berkembang mengalahkan petani gurem. Akhirnya, sebagian petani gurem yang menjadi proletar tak bertanah bekerja pada tetangganya sang petani-majikan. Sebagian yang lain mencari kerja upahan non-pertanian di perdesaan. Saat gagal mendapat pekerjaan upahan di perdesaan, mereka berbondong-bondong lari ke perkotaan. Proses itu kian masif sejak tahun 1980-an, ketika mekanisasi pertanian membuat makin sedikit pekerja yang dibutuhkan di sektor pertanian. Pada sisi lain, ekspansi korporasi pada tanaman ekspor seperti sawit atau karet, yang direstui negara dalam program “inti-plasma”, membuat banyak penduduk lokal diusir dari tanahnya. Perampasan tanah seperti itu kian memasifkan proletarisasi, bahkan kian beringas sejak tahun 2000-an ketika pemerintah makin bergantung pada ekspor hasil bumi ketimbang manufaktur untuk mengisi kas negara.

Limpahan pekerja yang menyerbu perkotaan kebanyakan hanya berbekal tenaga dan *skill* seadanya. Mereka mencari pekerjaan upahan di ekonomi formal. Urbanisasi terkontrol tak terkendali. Jika pada masa tahun 1970-an hanya sekitar seperlima penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, pada 2010 sudah sekitar separuh dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan memwadahi sekitar 12 juta orang. Banyak pekerja dari desa mencari pekerjaan di pabrik atau toko modern. Meski upahnya rendah, pekerjaan itu dianggap memberi kepastian dan sejumlah perlindungan normatif, seperti upah minimum, tunjangan sosial (kesehatan) serta iming-iming jaminan tunjangan pensiun. Itu sebabnya, banyak laporan menyebut bahwa orang rela membayar 1 kali besaran upah kepada makelar pekerjaan hanya untuk dieksploitasi di pabrik-pabrik di Tangerang maupun Bekasi. Namun demikian, pekerjaan kerah biru di ekonomi formal perkotaan tak pernah mampu menyerap limpaan pekerja dari perdesaan Indonesia. Berbeda dengan

temuan Portes dan Castells di Amerika Latin bahwa pada tahun 1980-an informalisasi meluas di sektor industri, sedangkan di Indonesia pada pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an industrialisasi berorientasi ekspor di bawah komando korporasi swasta sempat memberikan optimisme ketika banyak pekerjaan baru tercipta di sektor manufaktur dan menyerap banyak orang yang terlempar dari perdesaan. Namun, industrialisasi ala neoliberal itu memperlihatkan keterbatasannya ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia pada 1998. Sejak tahun 2000-an, berlangsung “de-industrialisasi prematur” tatkala pertumbuhan industri lebih rendah daripada dekade sebelumnya. Kemampuannya dalam menyerap pekerja dari perdesaan tidak dapat lagi diharapkan. Banyaknya kapital asing yang keluar saat krisis dan tak kembali lagi untuk menanamkan modal di sektor manufaktur, tetapi di sektor lain yang lebih menguntungkan dan lebih kecil risikonya, memberi pelajaran pahit: industrialisasi tak bisa digantungkan pada si kapitalis. Informalisasi industri juga mulai tumbuh dengan kian banyaknya pekerjaan sub-kontrak dari pabrik ke rumah tangga.

Akhirnya, banyak pekerja yang telanjur membanjiri perkotaan dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan upahan di ekonomi formal hanya punya dua pilihan: mencari pekerjaan upahan di ekonomi informal (serabutan) atau buat pekerjaan sendiri (usaha-sendiri tanpa mempekerjakan buruh upahan). Di Jakarta sendiri, pada 2018, pekerjaan informal masih menyumbang sekitar sepertiga dari total pekerjaan³¹, jumlah yang sejatinya lebih besar jika mengingat keterbatasan cara BPS menghitung informalitas. Mayoritas dalam bentuk berusaha sendiri, baik tanpa dibantu maupun dibantu pekerja upahan, seperti yang biasa kita lihat pada pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur

³¹ BPS DKI Jakarta, “Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Februari 2018”, dalam *Berita Resmi Statistik* No. 25/05/31, 2018, hal. 6.

hampir di setiap sudut Jakarta. Akan tetapi, mereka bukan terpisah sama sekali dari ekonomi formal. Banyak pekerja formal berpakaian necis di kawasan Sudirman-Thamrin yang menggantungkan kebutuhan makan mereka dari PKL informal yang menawarkan harga lebih murah dibanding gerai modern di mal. Itu hanya bisa terjadi karena PKL tidak memasukkan biaya tunjangan sosial, pensiun, dan berbagai biaya reproduksi lain ke dalam harga akhir dari produk jualan mereka. Bagi PKL yang mempekerjakan buruh upahan, mereka tak perlu bayar upah buruh sesuai upah minimum yang telah ditetapkan bagi pekerja formal. Sebagaimana disinggung Portes dan Castells, itu adalah bentuk subsidi dari ekonomi informal kepada ekonomi formal. Perusahaan-perusahaan besar di kawasan Sudirman-Thamrin dapat membayar pekerjaanya (formal) lebih murah, ketika sebagian dari kebutuhan reproduksi mereka dalam bentuk makanan disubsidi oleh pekerja informal yang dibayar lebih murah lagi. Subsidi seperti itu juga berlaku bagi pekerja bangunan dan pekerja-pekerja informal lain di perkotaan yang bekerja untuk perusahaan besar formal (properti, konstruksi). Perusahaan besar (formal) disubsidi oleh pekerja informal yang sebagian besar biaya reproduksi mereka tak ditanggung oleh perusahaan kapitalis. Dari sini, pekerja informal menjadi semacam, yang disebut Wilson, “pekerja pinggiran” atau yang disebut Marx sebagai “pasukan pekerja cadangan” yang sewaktu-waktu dapat disingkirkan ketika ekonomi lesu, untuk kemudian direkrut lagi ketika ekonomi tengah menggeliat. Pada gilirannya, secara tak sengaja, melimpahnya pekerja cadangan itu memberi manfaat bagi kapitalis, karena pekerja informal dapat mendisiplinkan pekerja “inti” (formal) dan memperkuat posisi tawar kapitalis mengingat pekerja telah dipecah ke dalam dua *labour regimes* nasional yang berbeda: formal dan informal.³²

³² Akan lebih bermanfaat memahami informalitas sebagai *labour regime* dan melihat pekerja informal berbeda

Diferensiasi Kelas Produsen Kecil Komoditas

Meski peran ekonomi informal dalam kapitalisme kiwari telah cukup jelas, yakni turut menyumbang bagi akumulasi kapital di ekonomi formal, dinamika internal ekonomi informal sendiri perlu lebih mendapat perhatian. Alasannya sederhana, tidak semua pelaku ekonomi informal menyumbang ekonomi formal secara sama. Sebagian menyumbang lebih besar dari yang lain ketika mereka berada dalam posisi paling bawah dalam rantai eksploitasi di ekonomi informal.

Bank Dunia yang sebelumnya cenderung menyamaratakan pelaku ekonomi informal sebagai “pengusaha mikro” yang melakukan usaha-sendiri, tampaknya mulai mengakui adanya diferensiasi sosial diantara mereka. Dalam risetnya mengenai “pengusaha mikro” perempuan di Indonesia, Bank Dunia menyebut dua tipe pengusaha mikro: “pengusaha-berorientasi kebutuhan” (*necessity entrepreneur*) dan “pengusaha-berorientasi pertumbuhan” (*growth-oriented entrepreneur*). Kategori pertama merujuk pada “pengusaha” yang menciptakan usaha sendiri karena tidak tertampung oleh lapangan kerja (terpaksa oleh keadaan), sedangkan kategori kedua menonjolkan “pilihan” si individu ketika menciptakan usaha sendiri. Bank Dunia menyebut mayoritas “pengusaha mikro” perempuan di Indonesia (sekitar 85 persen) termasuk dalam kategori pertama dan sisanya (15 persen) disebut sebagai pengusaha informal karena

secara struktural dengan pekerja formal dalam memahami akumulasi kapital dan perjuangan kelas ketimbang istilah yang cenderung “mencakup semuanya”, seperti “prekariat”-nya Guy Standing atau, untuk konteks perkotaan, “Kaum Miskin Kota” yang populer di Indonesia. Dapat dibayangkan seandainya semua pekerja di Indonesia diatur oleh satu undang-undang yang sama (formal), kekuatan posisi tawar pekerja terhadap kapitalis tentu akan berbeda.

ada pilihan untuk berkembang.³³ Sadar telah melakukan pembagian kategori berdasarkan kriteria subjektif (keinginan untuk subsisten *vis a vis* tumbuh/akumulasi), Bank Dunia segera menjustifikasi langkah ini dengan mengatakan bahwa perbedaan itu penting bagi strategi intervensi terhadap “pengusaha mikro” di ekonomi informal.³⁴

Jika Bank Dunia menggunakan ukuran “subjektif”, sedangkan riset lain yang disponsori PBB lebih menggunakan kriteria “objektif” ILO soal karakter pekerjaan. Mayang Rizky dan kawan-kawan membedakan pekerja informal “tingkat atas” dan pekerja informal “tingkat bawah”.³⁵ Mereka yang masuk kelompok pertama adalah usaha-sendiri yang dibantu pekerja upahan tetap dan pekerja informal yang mengisi posisi profesional, manajer, serta administrasi. Sementara yang termasuk dalam kategori kedua adalah usaha-sendiri tanpa dibantu pekerja, usaha-sendiri yang dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga tidak dibayar. Perbedaan “tingkat atas” dengan “tingkat bawah” itu berdasarkan pada perbedaan pendapatan yang diperoleh kedua kelompok. Mereka yang berusaha-sendiri dibantu pekerja upahan tetap dan pekerja informal profesional dilihat punya pendapatan lebih tinggi daripada mereka yang berusaha-sendiri tanpa dibantu pekerja tetap atau dibantu pekerja keluarga tidak dibayar.

Jika problem dari cara melihat diferensiasi ala Bank Dunia adalah kriteria subjektifnya, masalah dari pendekatan Rizky dan kawan-kawan dalam memahami diferensiasi sosial pada ekonomi informal di Indonesia

adalah mereka masih terkungkung dalam gradasi “kesempatan hidup” ala Max Weber yang membedakan posisi kelas berdasarkan pendapatan. Dalam kasus di atas, sama saja menganggap mereka yang punya usaha-sendiri dibantu pekerja upahan tetap berada di dalam kelas yang sama dengan pekerja informal yang mengisi posisi profesional, manajer, serta administrasi. Problem utama dari pendekatan kelas semacam itu adalah kelas sosial seakan hidup berdampingan dengan kelas lain, nyaris secara independen satu sama lain. Seolah-olah tidak ada hubungan kausalitas antara ambruknya kelas satu menjadi prasyarat bagi berjayanya kelas lain. Pendekatan Weberian gagal mengakui bahwa berjayanya suatu kelas dalam kapitalisme mensyaratkan eksploitasinya terhadap kelas lain.³⁶ Sementara itu, Marx telah menekankan watak ketergantungan dan kontradiksi kelas dalam kapitalisme antara pemilik modal yang memerlukan pemerasan nilai lebih dari pekerja untuk ekspansi modalnya. Kapitalis yang menguasai modal punya kuasa untuk mempekerjakan buruh upahan demi akumulasi, sementara pekerja yang hanya punya tenaga terpaksa bekerja untuk kapitalis demi memperoleh upah seadarnya bertahan hidup.

Diantara kelas kapitalis dan pekerja terletak mereka yang mengombinasikan modal dan tenaga dalam satu tempat. Mereka hidup subsisten. Mereproduksi diri melalui usaha-sendiri dengan memproduksi komoditas secara kecil-kecilan lewat modal dan tenaga sendiri. Mereka tidak mempekerjakan orang lain yang membuat mereka tidak mengeksploitasi orang lain. Di sisi lain, mereka tidak bekerja untuk orang lain yang membuat mereka tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Secara konseptual, mereka disebut sebagai produsen kecil komoditas (*petty commodity producers*) yang telah mapan digunakan

³³ The World Bank Office Jakarta, *Women Entrepreneurs in Indonesia: A Pathway to Increasing Shared Prosperity* (The World Bank: Jakarta, 2016), hal. 23.

³⁴ The World Bank, *Women Entrepreneurs in Indonesia...*, hal. 17.

³⁵ Mayang Rizky, Daniel Suryadarma, dan Asep Suryahadi, “Progress and Stagnation in the Livelihood of Informal Workers in an Emerging Economy: Long-term Evidence from Indonesia”, dalam *WIDER Working Paper* 143, (Helsinki: UNU-WIDER, 2020), hal. 4.

³⁶ John Gubbay, “A Marxist Critique of Weberian Class Analyses”, dalam *British Sociological Association*, Vol. 31, No. 1, 1997, hal.73-89.

untuk menjelaskan petani (sebagai *farmer*, bukan *peasant*).³⁷ Perlu ditegaskan bahwa watak produsen kecil komoditas (PKK) tidaklah stabil. Jika pendapatan mereka kira-kira setara dengan modal dan tenaga yang digunakan untuk memproduksi komoditas yang mereka jual, berarti mereka terlibat dalam “reproduksi sederhana” (subsisten); mereka mereproduksi diri kembali menjadi PKK. Namun, ketika pendapatan tak mencukupi untuk mengganti modal dan tenaga awal yang dihabiskan untuk produksi komoditas, mereka mengalami “tekanan reproduksi sederhana” dan dipaksa untuk menjual tenaganya demi upah agar bisa bertahan hidup. Dalam situasi itu, sebagaimana telah disinggung, PKK ditransformasi menjadi bagian dari kelas pekerja. Sebaliknya, ketika pendapatan melebihi modal dan tenaga awal yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditas, mereka memperoleh surplus. Jika keadaan surplus dapat dijaga dan ekspansi usaha terjadi, yang membuat PKK mulai merekrut buruh upahan untuk menjalankan usaha, maka PKK mengalami transformasi menjadi kapitalis kecil. Itu menggambarkan bahwa PKK selalu berada dalam “ancaman” diferensiasi kelas, antara menjadi kapitalis atau pekerja³⁸, meski hal demikian *tidak* mengimplikasikan bahwa semua PKK *pasti* akan terdiferensiasi. Proses diferensiasi kelas akan bergantung pada corak akumulasi kapital dan dinamika kelas dalam konteks spesifik.

³⁷ Bernstein, *Class Dynamics of Agrarian...*, hal. 4. Uraian bahwa sekarang sudah tidak ada lagi “*peasant*”, yang ada kini adalah “*farmer*”; lihat, Henry Benrstein, “Farewells to the Peasantry?” and its Relevance to Recent South African Debates”, dalam *Transformation: Critical Perspectives On Southern Africa*, Vol. 75, No.1, 2011, hal. 44-52; Mughtar Habibi, “‘Petani’ dalam Lintasan Kapitalisme”, dalam *Indoprogress*, dapat diakses melalui <https://indoprogress.com/2018/04/petani-dalam-lintasan-kapitalisme/>

³⁸ Untuk kasus Indonesia, lihat Mughtar Habibi, “Masters of the Countryside and Their Enemies: Class Dynamics of Agrarian Change in Rural Java”, dalam *Journal of Agrarian Change*, 2021, hal.1-27.

Diferensiasi kelas di antara pelaku ekonomi informal juga dapat ditemukan, misalnya, di Jakarta. Namun, data empiris yang disediakan BPS tidak bisa digunakan begitu saja. Penghitungan terhadap pekerjaan informal oleh BPS sangat berbeda dengan cara ILO yang menggunakan pendekatan “perusahaan” dan “pekerjaan” yang terekam dalam dua variabel: tipe unit organisasi dan status pekerjaan untuk menghitung pekerjaan informal. Akan tetapi, seperti terlihat di Tabel 2, BPS menggunakan pendekatan “pekerjaan”, sehingga dua variabel yang digunakan adalah status dan jenis pekerjaan utama (bukan tipe unit produksi). Tanpa data mengenai tipe unit produksi (antara yang formal/terdaftar dan informal/tidak terdaftar), kita tidak bisa mengetahui apakah suatu status pekerjaan itu dilakukan di dalam “sektor formal” atau “sektor informal.” Semata mengaitkan status pekerjaan dengan jenis pekerjaan utama, hitungan tentang informalitas tampak terlalu lebih-lebihkan jumlah pekerja formal. Contoh paling gamblang adalah dalam status pekerjaan “usaha sendiri dibantu pekerja dibayar” (Tabel 2 baris 3). Badan Pusat Statistik menganggap semua jenis pekerjaan utama bersifat formal. Jika itu diterima begitu saja, kesimpulannya menjadi *absurd*: tidak ada majikan informal! Itu tentu bertentangan dengan fakta sederhana bahwa banyak usaha PKL yang tidak terdaftar (apalagi membayar pajak), tetapi karena laris-manis, mempekerjakan buruh upahan tetap, untuk menjalankan roda bisnis. Alexander Rothenberg dan kawan-kawan, dengan pendekatan unit produksi, melaporkan bahwa 96 persen usaha mikro (mempekerjakan pekerja kurang dari 5 orang) dan 93 persen usaha kecil (dengan pekerja 5-19 orang) di Indonesia adalah usaha informal.³⁹

Sebelum didera pandemi Covid-19, BPS

³⁹ Alexander D Rothenberg, dkk, “Rethinking Indonesia’s Informal Sector”, dalam *World Development*, Vol. 80, 2016, hal. 101.

Tabel 2. Cakupan “Pekerjaan dalam Kegiatan Informal” BPS⁴⁰

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama							
	a Tenaga Profesional	b Tenaga Kepemimpinan	c Pelaksana dan tata usaha	d Tenaga Penjualan	e Tenaga usaha jasa	f Pertanian, kehutanan, perikanan	g/h/i Tenaga produksi/ operasional/ pekerja kasar	lainnya
Usaha-sendiri	F	F	F	INF	IINF	INF	INF	INF
Usaha-sendiri dibantu pekerja tidak dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F
Usaha-sendiri dibantu pekerja dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja lepas pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja lepas non-pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja keluarga tak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan:

INF= Informal, F= Formal

Jakarta tahun 2019 mencatat bahwa “usaha-sendiri dibantu pekerja dibayar” berjumlah 183.231 orang⁴¹, turun sedikit dari 192. 976 orang di tahun 2011. Setelah beberapa bulan pandemi korona, jumlah mereka turun cukup signifikan menjadi tinggal 152.646 orang pada Agustus 2020. Badan Pusat Statistik menganggap mereka semua bagian dari sektor formal dan karenanya adalah “majikan formal.” Akan tetapi, seperti telah disinggung

sebelumnya, BPS mengabaikan status informal/formal dari suatu usaha/unit produksi, seperti yang digunakan ILO. Rothernberg dan kawan-kawan⁴², dengan pendekatan status unit produksi/usaha, memperkirakan bahwa 95 persen usaha di Indonesia memiliki pekerja kurang dari 10 orang (usaha mikro) dan 98 persen dari semua usaha itu adalah usaha informal. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa 93 persen dari seluruh usaha di Indonesia termasuk dalam kategori usaha informal. Jika hitungan itu diterapkan untuk Jakarta, barangkali secara kasar dapat dikata-

⁴⁰ BPS, *Sensus Ekonomi 2006: Analisis Ketenagakerjaan 2006* (Jakarta: BPS, 2009), hal. 95.

⁴¹ BPS DKI Jakarta, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta Agustus 2019* (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2019), hal.81.

⁴² Rothernberg,dkk, “Rethinking Indonesia’s...”, hal. 102.

kan bahwa sekitar 90 persen dari 152.646 “usaha-sendiri yang dibantu pekerja dibayar” pada Agustus 2020 sebenarnya adalah “majikan informal.”

Jumlah majikan informal itu jauh lebih sedikit (hanya sekitar sepersepuluh) dari PKK informal di Jakarta. Menggunakan ukuran BPS, jumlah kombinasi antara “usaha-sendiri” dan “usaha-sendiri dibantu pekerja tidak dibayar” informal di Jakarta adalah 743.902 orang di tahun 2011.⁴³ Sekitar satu dekade kemudian, Agustus 2020, mereka telah berjumlah 1.057.142 orang.⁴⁴ Jumlah tersebut meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya (2019) yang masih 936.527 orang.⁴⁵ Pandemi sejak awal 2020 disinyalir menjadi pendorong utama bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaan upahan untuk menciptakan usaha sendiri. Selain itu, jika kita melihat penurunan jumlah majikan pada periode pandemi di atas, bisa jadi banyak majikan informal yang memberhentikan pekerja upahannya dan karenanya majikan ini berubah status menjadi PKK. Sama seperti kategori majikan, ukuran informalitas BPS untuk “usaha-sendiri” dan “usaha-sendiri dibantu pekerja tidak dibayar” juga cenderung melebih-lebihkan jumlah pekerja formal. Karena itu, jumlah PKK informal tampaknya lebih tinggi daripada yang diemukakan disini.

Sementara itu, jumlah “kelas-kelas pekerja” informal di Jakarta lebih sedikit daripada PKK, kendati jumlah mereka bisa dua kali lipat dari jumlah majikan informal. Sekitar satu dekade sebelumnya (2011), kombinasi antara “pekerja lepas pertanian”, “pekerja lepas non-pertanian” dan “pekerja keluarga tak dibayar” di Jakarta berjumlah 328.810 orang.⁴⁶ Sempat turun menjadi 266.605

orang pada Agustus 2019, namun jumlahnya melonjak drastis pada Agustus 2020 ke angka 402.301 orang. Pandemi Covid-19 jelas menjadi penyebab. Banyak pekerja formal di Jakarta yang kehilangan pekerjaan terpaksa mencari pekerjaan serabutan informal yang tersedia. Bersama dengan PKK informal, pekerja upahan informal itulah yang menyubsidi ekonomi formal paling besar mengingat sebagian besar biaya reproduksi mereka tidak dibayar oleh majikan mereka (baik formal maupun informal), sementara biaya reproduksi PKK informal juga tidak ditanggung oleh konsumen mereka. Sebaliknya, majikan informal menikmati keadaan minim aturan tempat mereka tidak perlu membayar para pekerjanya sesuai upah minimum dan juga tidak membayar pajak.

Data statistik memang menyediakan gambaran umum tentang diferensiasi kelas di ekonomi informal Jakarta, namun hal yang lebih penting adalah menjelaskan proses dan mekanisme terjadinya diferensiasi kelas itu. Laporan media massa memberi sedikit ilustrasi anekdotal mengenai hal itu. Misalnya, ada yang berhasil menjadi juragan barang “rongsok” berkat kepemilikan akses terhadap barang bekas.⁴⁷ Atau PKL yang berubah menjadi juragan tas karena berhasil mengombinasikan keahlian membuat tas dan jaringan sosial untuk menopang bisnisnya.⁴⁸ Juga keberhasilan seorang buruh cuci piring menjadi juragan warung makan padang berkat keahlian memasak dan akses kredit ke bank.⁴⁹ Akan tetapi, gambaran menyeluruh mengenai diferensiasi kelas di ekonomi informal dan dampaknya bagi ekonomi formal memerlukan riset sistematis yang lebih mendalam. Riset semacam itu perlu menyoroti bagaimana proses dan mekanisme yang memungkinkan PKK bertransformasi menjadi

⁴³ BPS DKI Jakarta, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta Agustus 2011* (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2011), hal. 66.

⁴⁴ BPS DKI Jakarta, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020* (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2020), hal. 81.

⁴⁵ BPS DKI Jakarta, *Keadaan...2019*, hal. 81.

⁴⁶ BPS DKI Jakarta, *Keadaan...2011*, hal. 66.

⁴⁷ Lihat, “Kisah Nurcholis Agi, Juragan ‘Mal Rongsok’ di Depok”, dalam *Kompas*, 22 Mei 2018.

⁴⁸ Lihat, “Adi, Pedagang Kaki Lima yang Jadi Juragan Tas”, dalam *Kompas*, 07 Mei 2009.

⁴⁹ Lihat, “Sono, Dari Pencuci Piring Menjadi Juragan Warung Makan Padang”, dalam *Kontan*, 8 Agustus 2009.

majikan informal (atau formal) dan sebaliknya. Juga, bagaimana proses dan mekanisme yang membuat PKK berubah menjadi pekerja upahan dan sebaliknya. Untuk merekam hal itu, peran negara dan ekonomi formal (korporasi swasta) juga perlu dilihat dalam membentuk dinamika kelas ekonomi informal dan dampaknya bagi ekonomi formal.

Reproduksi Kelas di Ekonomi Informal

Diferensiasi kelas di antara pelaku ekonomi informal mengimplikasikan perbedaan cara mereka mereproduksi diri. Reproduksi kelas berkenaan dengan pertanyaan: *digunakan untuk apa hasil yang diperoleh dari produksi komoditas?*⁵⁰ Secara teoretis, Bernstein memberi beberapa petunjuk mengenai jawaban dari pertanyaan itu. Bagi pemilik modal yang mengomando pekerjanya dalam proses produksi dan meraup laba/surplus dari komoditas yang dijual, kelas majikan akan menggunakan *profit* ini untuk dua kemungkinan: konsumsi barang mewah dan investasi ulang. Ketika si kapitalis lebih banyak memutar kembali laba ke usaha bisnisnya, mereka akan terlibat dalam “reproduksi yang diperluas” (*expanded reproduction*) atau populer disebut sebagai kegiatan akumulasi.

Sayangnya, studi tentang kegiatan akumulasi para majikan di ekonomi informal perkotaan masih jarang dilakukan. Untuk Indonesia, yang sering direkam adalah kegiatan akumulasi para petani-kapitalis di perdesaan.⁵¹ Di perkotaan, kita memperoleh sejumlah laporan media yang hanya menukil soal-soal kegiatan juragan informal. Ada juragan informal yang menggunakan sebagian labanya untuk membangun rumah mewah di

kampung halaman. Sebagian lagi membeli mobil mewah. Juragan yang lain tentu ada juga yang memilih kegiatan produktif untuk mengembangkan bisnis dengan membuka *outlet* baru atau diversifikasi produk.⁵² Yang tidak tersua dari cuplikan-cuplikan berita itu adalah bagaimana kapitalis kecil informal itu mengadopsi pola akumulasi tertentu di tengah kondisi bisnis yang melingkupinya. Sebagian dari mereka bisa saja terseret hukum pasar kapitalis yang menuntut mereka untuk tetap kompetitif dengan ekspansi usaha yang kian besar. Ujung dari semua itu “memaksa” mereka menjadi usaha formal di bawah pengaturan negara, yang berarti naiknya ongkos pekerja ketika status pekerja mereka berubah menjadi pekerja formal. Di sisi lain, sebagian dari mereka mengembangkan usaha seadanya dan hidup mewah. Usaha mereka tetap kecil dan informal dengan biaya pekerja yang tetap murah, namun bisa jadi mereka akan tergilas oleh kapitalis lain dan terempas dari posisinya sebagai majikan. Sebagian yang lain mungkin siap dengan formalisasi usaha yang kian membesar, sekaligus juga siap untuk mempekerjakan buruhnya secara informal (pekerja informal di sektor formal) agar upah pekerja tetap murah. Untuk memahami dinamika akumulasi seperti itu jelas memerlukan riset yang lebih sistematis.

Sementara itu, bagi PKK yang mengombinasikan modal dan tenaga dalam satu tempat, seperti telah disinggung, reproduksi mereka akan menghadapi tiga kemungkinan: bertransformasi menjadi kapitalis dan terlibat dalam akumulasi; terlibat dalam “reproduksi sederhana” dan kembali menjadi PKK; atau mengalami “tekanan reproduksi sederhana” ketika hasil produksi lebih rendah daripada modal dan tenaga yang dikeluarkan untuk menghasilkan komoditas, yang akhirnya

⁵⁰ Bernstein, *Class Dynamics of Agrarian...*, hal. 23.

⁵¹ Misalnya, Jonathan Pincus, *Class Power and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java* (London: Macmillan Press Ltd, 1996), Bab. 5.

⁵² Lihat, “Intip Rumah Miliaran Milik Pengusaha Warteg di Kampungnya”, dalam *Tempo*, 28 Maret 2015; “Kisah Pedagang Bakso Beli Mobil Mewah Bayar Kontan”, dalam *Koran Bernas*, 10 Februari 2020; “Mencicipi Kemitraan Mi Ayam Malioboro”, dalam *Kompas*, 6 Agustus 2012.

memaksa mereka mencari pekerjaan upahan yang mentransformasikan mereka menjadi bagian dari kelas pekerja. Pada umumnya, dinamika reproduksi kelas PKK bergantung pada turun-naik pasar komoditas yang melingkupi mereka. Namun, selain aspek eksternal itu, elemen internal PKK berupa komposisi rumah tangga mereka, juga berperan penting bagi reproduksi. Itu berkaitan dengan relasi gender dan pola regenerasi di rumah tangga.⁵³ Perempuan yang berperan ganda sebagai istri yang “mengelola” urusan domestik tak dibayar sekaligus bekerja membantu suami memproduksi komoditas, cenderung menyediakan tenaga memadai bagi rumah tangga untuk meraih “reproduksi sederhana” mereka. Sebaliknya, ketika istri harus fokus mengurus anak-anak yang masih kecil, si suami yang bekerja seorang diri mungkin lebih rentan mengalami “tekanan reproduksi sederhana” untuk menjadi pekerja upahan. Itu akan berbeda tatkala anak-anaknya telah cukup dewasa untuk turut membantu usaha keluarga sebagai “pekerja tidak dibayar”, yang dapat membantu “reproduksi sederhana” rumah tangga PKK. Selain dinamika pasar dan komposisi rumah tangga, pola reproduksi PKK juga ditentukan oleh intervensi negara terhadap mereka. Barbara Harris-White, misalnya, menunjukkan bahwa dalam kasus PKK pertanian (petani/*farmer*) di India, negara berperan ambivalen bagi reproduksi PKK.⁵⁴ Di satu sisi, negara memberikan subsidi *input* pertanian (benih, pupuk, pestisida) bagi PKK pertanian. Namun, di sisi lain, negara tampak acuh tak acuh dengan ekspansi korporasi serta alih fungsi lahan yang dapat mengancam PKK pertanian.

Studi tentang PKK telah cukup banyak dalam kasus PKK pertanian. Namun, belum

banyak perhatian diarahkan pada PKK non-perdesaan, seperti PKL yang hidup dalam konteks ekonomi informal perkotaan. Di Indonesia, kita masih tetap mengandalkan laporan yang membahas dinamika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terkait relasi gender, laporan-laporan tersebut memberi perhatian lebih banyak pada perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan dalam menjalankan usaha dibanding perhatian pada peran ganda perempuan dan pekerjaan domestik perempuan yang tak dibayar bagi reproduksi mereka sebagai PKK.⁵⁵ Sementara itu, kita juga bisa melihat watak ambivalensi negara terhadap PKK di Indonesia. Negara menyediakan bantuan kredit murah bagi UMKM lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada akhir 2017, kredit murah yang dikucurkan untuk usaha mikro dan kecil saja mencapai sekitar Rp 470 triliun.⁵⁶ Usaha mikro dan kecil yang mencakup puluhan juta pelaku itu sebagian besar adalah usaha informal.⁵⁷ Wilayah Jakarta menikmati bantuan kredit terbesar dibanding wilayah lain (sekitar 15 persen dari total pinjaman). Perlu studi lebih lanjut untuk melihat seberapa jauh dampak bantuan itu bagi beberapa PKK yang berhasil mentransformasi diri menjadi kapitalis kecil informal serta seberapa jauh kegagalan untuk mengakses bantuan kredit berperan dalam transformasi mereka menjadi pekerja upahan. Selain bantuan, kita juga menemukan kebijakan anti-PKK berupa pengusiran atau pelarangan aktivitas PKL di berbagai sudut Jakarta dan kota-kota lain serta dukungan negara terhadap ekspansi *minimarket* modern yang secara tidak langsung mengancam keberadaan PKK.

⁵⁵ Misalnya, International Finance Corporation, *Women-owned SMEs in Indonesia: A Golden Opportunity for Local Financial Institutions* (Washington: IFC, 2016).

⁵⁶ ILO, *Financing Small Businesses in Indonesia: Challenges and Opportunities* (Jakarta: ILO, 2019), hal. 18.

⁵⁷ Terdapat total 62.928.077 unit usaha di Indonesia, 62.106.900 (98,7%) adalah usaha mikro, 757.090 (1,2%) usaha kecil, 58.627 (0,09%) usaha menengah, dan hanya 5.460 (0,01%) usaha besar; ILO, *Financing Small Businesses in Indonesia...*, hal. 14.

⁵³ Barbara Harris-White, “Capitalism and the Common Man: Peasants and Petty Production in Africa and South Asia”, dalam *Agrarian South: Journal of Political Economy*, Vol. 1, No. 2, 2012, hal. 130.

⁵⁴ Harris-White, “Capitalism and the Common Man...”, hal. 136.

Jika PKK informal dapat menikmati bantuan lumayan dari negara, pekerja upahan informal hanya mendapat bantuan negara sekadar untuk bertahan hidup. Sebagai kelas yang menggantungkan reproduksi diri dan rumah tangga sepenuhnya dari upah yang diterima, pekerja upahan informal memerlukan intervensi negara terkait upah dan kondisi kerja. Namun, pekerja informal tak dimasukkan dalam aturan ketenagakerjaan negara sebagaimana pekerja formal. Selain tiadanya perlindungan upah minimum dan aturan kondisi kerja, pekerja informal juga mesti menanggung secara mandiri sebagian besar biaya reproduksinya; pada umumnya mereka mesti membayar sendiri jika mau menjadi bagian dari jaminan kesehatan negara (BPJS).⁵⁸ Negara hanya memberi bantuan sosial secara sporadis kepada kategori “penduduk miskin” berupa bantuan tunai serta bantuan umum lewat subsidi pendidikan dalam bentuk BOS (biaya operasional sekolah). Bantuan minimal semacam itu hanya membantu pekerja informal untuk mereproduksi tenaganya sebagai pekerja rendahan lagi. Bantuan sosial yang berfungsi sekadar “alat untuk mengelola kemiskinan”,⁵⁹ dengan mengabaikan ketimpangan relasi kuasa sebagai akar persoalan, juga marak terjadi di negara-negara lain.⁶⁰ Watak bantuan sosial di era neoliberal berangkat dari asumsi menyedatkan bahwa kemiskinan hanyalah penyakit sampingan dari pertumbuhan ekonomi. Bantuan sosial sementara sudah cukup asal pertumbuhan ekonomi bisa terus tumbuh.⁶¹

Mereka tak mengakui bahwa model pembangunan (pertumbuhan ekonomi) itulah sebenarnya yang justru menjadi akar eksploitasi dan kemelaratan.

Di tengah minimnya perlindungan dan bantuan negara kepada pekerja informal, pandemi Covid-19 sejak awal 2020 di Indonesia membuka mata banyak orang betapa rentannya kelas pekerja, baik formal maupun informal. Pada Agustus 2020, BPS Jakarta melaporkan hampir setengah juta pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Sekitar separuh lebih sedikit dari mereka berlabuh ke ekonomi informal untuk bertahan hidup. Akan tetapi, hampir separuh dari sisanya tak terserap pekerjaan informal dan terpaksa menganggur.⁶² Ribuan pekerja memilih kembali ke kampung halaman. Namun, bertentangan dengan anggapan pemerintah bahwa perdesaan mampu menyediakan pekerjaan orang dari kota, banyak orang kembali ke desa justru untuk mencari biaya hidup lebih murah daripada di kota, tempat mereka belum tentu dapat pekerjaan di desa.⁶³ Negara, di tingkat nasional pada 2020, memang menyediakan bantuan berupa subsidi gaji untuk sekitar 11 juta pekerja formal yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan tunai yang menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.⁶⁴ Akan tetapi, cakupan bantuan untuk pelaku ekonomi informal mengimplikasikan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil lainnya tak tersentuh bantuan. Di tengah implan pandemi Covid-19 dan keadaan darurat untuk bertahan hidup, kelas pekerja yang posisi tawarnya makin lemah dengan kian berlim-

⁵⁸ Lihat, “Pekerja Informal Perlu Dilindungi”, dalam *Kompas*, 20 Oktober 2017.

⁵⁹ Alfredo Saad-Filho, “Social Policy for Neoliberalism: The Bolsa Família Programme in Brazil”, dalam *Development and Change*, Vol. 46, No. 6, November 2015, hal. 1247-1248.

⁶⁰ Louise Tillin dan Jane Duckett, “The Politics of Social Policy: Welfare Expansion in Brazil, China, India and South Africa in Comparative Perspective”, dalam *Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 55, No. 3, 2017, hal. 253-277.

⁶¹ Vilas Carlos, “Neoliberal Social Policy Managing Poverty (Somehow)”, dalam *NACLA Report on the Americas*, Vol. 29, No.6, 1996, hal.16.

⁶² BPS DKI Jakarta, *Keadaan...2020*, hal. 1-2.

⁶³ Lihat, Rachel M Silvey, “Migration under Crisis: Household Safety Nets in Indonesia’s Economic Collapse”, dalam *Geoforum*, Vol. 32, No.1, 2001, hal. 33-45. Saat krisis ekonomi 1998 menghantam Indonesia, orang kembali ke desa karena tak kuat menanggung biaya hidup di kota tanpa pekerjaan.

⁶⁴ Lihat, “Menaker Sebut 11,05 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji”, dalam *Tempo*, 26 November 2020; “Pemerintah Usahakan Tambah 12 Juta Penerima BLT UMKM”, dalam *Republika*, 1 April 2021.

pahnya “pekerja cadangan” (informal), harus menelan pahit berupa Undang-Undang Cipta Kerja yang secara mendasar mempreteli hak-hak pekerja formal.

Membayangkan dunia pasca pandemi Covid-19 yang cerah, baik bagi pekerja upahan formal dan pekerja upahan informal, mensyaratkan perombakan radikal terhadap kapitalisme kontemporer yang memelihara pemisahan pekerjaan formal dan informal demi ekspansi akumulasi kapital. Bagaimanapun juga, upaya itu amat bergantung pada hadir tidaknya suatu pengorganisasian pekerja yang mencakup pekerja formal dan pekerja informal. Dan Gallin, misalnya, aktivis buruh senior Eropa menulis di *Antipode*, “Tidaklah mungkin untuk membayangkan bisa mengorganisasi mayoritas pekerja di tingkat dunia saat ini tanpa upaya serius mengorganisasi pekerja di sektor informal.... Sejumlah besar pekerja dunia, termasuk yang termiskin, mereka yang paling membutuhkan pertahanan-diri melalui organisasi, adalah mereka pekerja informal”.⁶⁵ Gallin paham bahwa ekonomi formal

dan informal adalah satu kesatuan, produk dari kapitalisme global, seperti disebut Portes dan Castells. Hanya jabat erat antara pekerja formal dan informal yang dapat menyerang jantung kapital. Meminjam ungkapan Wilson, mengorganisasi pekerja upahan informal berarti memaksa kapitalis untuk membayar sebagian besar biaya reproduksi pekerja (jaminan sosial, bukan hanya kebutuhan fisik dasar) yang selama ini tak mau mereka tanggung. Upaya itu sekaligus bertujuan menghilangkan posisi “pekerja inti” (formal) dan “pekerja cadangan” (informal) dalam kapitalisme yang selama ini secara efektif memecahbelah dan memperlemah kekuatan kelas pekerja. Yang masih menjadi pertanyaan untuk konteks negeri pinggiran barangkali adalah bagaimana menempatkan posisi politik Produsen Kecil Komoditas (PKK) informal yang sebagian dari mereka justru ingin menjadi kapitalis kecil? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan nasib pengorganisasian dan reproduksi kelas pekerja (baik formal maupun informal) di masa depan. ●



⁶⁵ Dan Gallin, “Propositions on Trade Unions and Informal Employment in Times of Globalisation”, dalam *Antipode* Vol. 33, No. 3, 2001, hal. 532.